

## Hasil Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu - LKE KEMENPANRB

| No. | Komponen   | Sub Komponen                                      | Indikator Penilaian                           | Bobot | Skor | Skor Index | Catatan   | Rekomendasi   | Tim Penilai                        |
|-----|------------|---|---|-------|------|------------|---|---|------------------------------------|
| 1   | RB General | Strategi Pelaksanaan RB General                   | Rencana Aksi Pembangunan RB General           | 3     | 1.63 | 1.63       | 1. Penetapan Kegiatan Utama Mandatory belum sepenuhnya sesuai dengan mandat Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 Terdapat target Kegiatan Utama yang belum didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023); 2. Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 3. Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; 4. Indikator Output atas Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan; 5. Terdapat target Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dalam target Output Rencana Aksi. | 1. Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023); 2. Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 3. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; 4. Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan; 5. Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama. | Tim Penilai Nasional               |
| 2   | RB General | Strategi Pelaksanaan RB General                   | Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General  | 7     | 50   | 1.9        |   |   | Tim Penilai Nasional               |
| 3   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi | 2     | 100  | 2          | Sangat Baik, dengan capaian 109%  | Agar segera ditetapkan Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.  | Kementerian Dalam Negeri           |
| 4   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan                     | Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk            | 2     | 2    | 0.8        |   | segera ditetapkan menjadi peraturan   | Kementerian PANRB - Asisten Deputi |

| No. | Komponen   | Sub Komponen                                      | Indikator Penilaian  | Bobot | Skor | Skor Index | Catatan   | Rekomendasi  | Tim Penilai   |
|-----|------------|---|--|-------|------|------------|---|--|---|
|     |            | Reformasi Birokrasi                               | Penyederhanaan Birokrasi                                       |       |      |            |   |  | Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana |
| 5   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 4     | 3.01 | 2.41       | . Pemerintah Provinsi Bengkulu belum menetapkan rencana pemantauan atas rencana tindak pengendalian yang dilaksanakan atas risiko yang terjadi. 2. Pimpinan Satuan Kerja yang diuji petik belum sepenuhnya mendorong penerapan manajemen risiko di lingkungannya hal ini terlihat dalam penilaian kinerja, dimana unsur manajemen risiko belum menjadi indikator penilaian kinerja; 3. Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, Satuan Kerja yang diuji petik belum sepenuhnya mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan; 4. Pimpinan Satuan Kerja yang diuji petik belum mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk penerapan manajemen risiko dan telah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan; 5. Belum semua pegawai mendapatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko; 6. Pimpinan | 1. menginstruksikan Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk melakukan pemantauan dan reviu secara berkala atas pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. 2. menerapkan MRI sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu; 3. meningkatkan kualitas pengelolaan risiko meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan prioritas risiko, rencana tindak pengendalian (RTP) dan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko baik risiko strategis maupun operasional; 4. menginstruksikan pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk :menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons; 5. menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk melakukan monitoring dan pemantauan berkelanjutan atas implementasi insersi pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal; 6. melakukan analisis dan asesmen risiko dalam menyusun rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan; 7. membangun saluran pelaporan internal (Whistleblowing) yang efektif dan kredibel guna menerima | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan               |

| No. | Komponen | Sub Komponen | Indikator Penilaian | Bobot | Skor | Skor Index | Catatan   | Rekomendasi | Tim Penilai  |  |
|-----|----------|--------------|---------------------|-------|------|------------|---|-------------|--|--|
|     |          |              |                     |       |      |            | <p>Satuan Kerja belum sepenuhnya menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan; 7. Belum semua pegawai memiliki kesadaran terkait dengan manajemen risiko; 8. Penentuan selera risiko belum tertuang dalam kebijakan manajemen risiko Pemerintah Provinsi Bengkulu. 9. Analisis dan asesmen risiko belum sepenuhnya dilakukan dalam menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan; 10. Saluran pelaporan internal belum sepenuhnya dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian anti korupsi meningkat dan memberikan efek penggantar yang efektif. AOI APIP 1. SDM APIP masih belum memenuhi kebutuhan ideal (formasi kebutuhan) 2. Alokasi anggaran pengawasan belum memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 3. Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen 4. Pengawasan yang dilakukan belum menyasar pada program strategis daerah dan belum dilaksanakan secara lintas</p> |             | <p>pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian anti korupsi meningkat. Rekomendasi APIP 1. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern. pemenuhan kebutuhan SDM. penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi). penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. serta pembiayaan operasional pengawasan intern 2. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern. pemenuhan kebutuhan SDM. penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi). penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. serta pembiayaan operasional pengawasan intern 3. Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis. risiko operasional. risiko fraud. dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam penyusunan PPBR; Menginstruksikan kepada Inspektor Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat di bidang pengelolaan risiko. audit kinerja. dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan. dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP. CRMO. CFrA. dsb. 4. APIP agar menyusun dan menetapkan area</p> |  |

| No. | Komponen | Sub Komponen | Indikator Penilaian | Bobot | Skor | Skor Index | Catatan  | Rekomendasi   | Tim Penilai |
|-----|----------|--------------|---------------------|-------|------|------------|--|---|-------------|
|     |          |              |                     |       |      |            | <p>sectoral 5. APIP belum melakukan evaluasi atas implementasi MR hingga efektivitas RTP 6. Rekomendasi atas hasil layanan jasa konsultansi APIP belum menghasilkan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan bagi stakeholders. 7. Belum menerapkan QAIP secara optimal mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tindaklanjut hasil QAIP</p> | <p>pengawasan yang menyasar pada sasaran strategis/program prioritas daerah yang bersifat lintas sektoral. serta berbasis prioritas dan risiko; Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat di bidang pengelolaan risiko. audit kinerja. dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan. dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP. CRMO. CFRA. dsb. 5. Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis. risiko operasional. risiko fraud. dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam penyusunan PPBR; dan Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan penilaian kematangan risiko atas register risiko/ profil risiko yang disusun oleh seluruh manajemen perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah (risiko strategis. risiko operasional. risiko fraud. dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) 6. APIP agar dapat menyusun rencana aksi atas substansi kegiatan konsultansi yang telah dilaksanakan disertai dengan monitoring terhadap implementasi rencana aksi tersebut dan pemanfaatannya oleh stakeholder terkait 7. APIP agar melakukan optimalisasi pemantauan secara berkala terhadap implementasi QAIP sebagaimana telah diatur dalam pedoman AAUPI maupun pedoman QAIP lainnya yang telah diterbitkan oleh BPKP</p> |             |

| No. | Komponen   | Sub Komponen                                      | Indikator Penilaian   | Bobot | Skor  | Skor Index | Catatan   | Rekomendasi   | Tim Penilai                              |
|-----|------------|---|---|-------|-------|------------|---|---|--|
| 6   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas              | 3     | 0.5   | 0.43       | Tingkat keberhasilan pembangunan ZI sebesar 0% (Cukup) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2021 Jumlah unit yang diusulkan: 3 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit yang diusulkan: 0 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Tahun 2023 Jumlah unit yang diusulkan: 1 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja  | 1. Pimpinan unit kerja bersama dengan Tim Penilai Internal (TPI) Instansi diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM 2. TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif. 3. Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman Sumber Daya Manusia TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada Tim Penilai Nasional untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM | Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas |
| 7   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Nilai Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 4     | 69.31 | 2.77       | ☒ Terdapat indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time bound) dan tidak sesuai pada levelnya; ☒ Aplikasi manajemen kinerja Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempermudah proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan data kinerja terbaru sebagian Perangkat Daerah yang belum tersaji dalam aplikasi tersebut. ☒ Sebagian besar Laporan | 1) Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada perangkat daerah dan kepala bidang; 2) Mengoptimalkan aplikasi manajemen kinerja Provinsi Bengkulu sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja gubernur dan setiap Perangkat Daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya; 3) Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan perangkat daerah mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis  | Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas |

| No. | Komponen   | Sub Komponen                                      | Indikator Penilaian            | Bobot | Skor  | Skor Index | Catatan   | Rekomendasi  | Tim Penilai                       |
|-----|------------|---|--------------------------------|-------|-------|------------|---|--|-----------------------------------|
|     |            |   |                                |       |       |            | Kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai; 3) Laporan evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah; Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah   | peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; 4) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan; Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah |                                   |
| 8   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Perencanaan Pembangunan | 2.5   | 85.19 | 2.13       | Untuk pemerintah Provinsi Bengkulu masih terdapat beberapa aspek penilaian yang belum mencapai nilai maksimal, yaitu: 1. Pada 1.a.1.a tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan sasaran PN RPJMN, memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sejumlah 0,32 dari bobot maksimal 0,50. 2. Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-indikator 1.b.2 bernilai masih Sangat Kurang dengan nilai 0,87 dari total nilai 1,50 3. Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-indikator 1.b.3 bernilai masih Kurang dengan Nilai 1 dari total nilai 1,50 4. Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD | Rekomendasi Perbaikan Perencanaan untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu, adalah: 1. Perlu meningkatkan dan menyesuaikan target indikator sasaran pembangunan daerah pada RPJMD  | Kementerian PPN/Bappenas - Bioren |

| No. | Komponen   | Sub Komponen                                      | Indikator Penilaian  | Bobot | Skor  | Skor Index | Catatan  | Rekomendasi   | Tim Penilai   |
|-----|------------|---|--|-------|-------|------------|--|---|---|
| 9   | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2     | 1     | 0.4        | dengan RKP pada sub-indikator 1.b.6 bernilai masih Kurang dengan nilai 1 dari total nilai 1,50 5. Rendahnya hasil penilaian Kualitas Perencanaan dokumen Inovasi Perencanaan Pembangunan 2.b.1 bernilai masih Sangat Kurang dengan nilai 0 dari total nilai 4,50 6. Rendahnya hasil penilaian Kualitas Perencanaan dokumen Keterkaitan Output dengan Outcome Inovasi 2.b.2 bernilai masih Sangat Kurang dengan nilai 0 dari total nilai 4,50 | Perlu menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA  | "Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" |
| 10  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Digitalisasi Arsip   | 2.5   | 87.14 | 2.18       | 1. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan dan melakukan sosialisasi pada sebagian besar kebijakan kearsipan. Kebijakan yang belum ditetapkan adalah penyelenggaraan kearsipan. Sementara itu, kebijakan yang belum memenuhi seluruh kriteria adalah kebijakan klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip. 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   | 1. Menyempurnakan seluruh kebijakan kearsipan yang belum memenuhi seluruh kriteria seperti klasifikasi arsip, JRA, dan penyelenggaraan kearsipan serta menyosialisasikan. 2. Menerapkan aplikasi SRIKANDI pada seluruh perangkat daerah dan melaksanakan seluruh proses bisnis aplikasi SRIKANDI termasuk pemberkasan arsip 3. Mengikutsertakan pada diklat pengelolaan arsip elektronik dan atau sertifikasi kompetensi 5. Melakukan unggahan secara rutin pada simpul JIKN dengan juga memenuhi | Arsip Nasional Republik Indonesia   |

| No. | Komponen   | Sub Komponen                                      | Indikator Penilaian                                     | Bobot | Skor | Skor Index | Catatan   | Rekomendasi  | Tim Penilai   |
|-----|------------|---|---|-------|------|------------|---|--|---|
|     |            |   |   |       |      |            | Provinsi Bengkulu telah melaksanakan alih media arsip dengan memenuhi target dan seluruh prosedur (pembuatan berita acara, daftar arsip alih media, dan autentikasi arsip). 3. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menggunakan SRIKANDI pada lebih dari 5 perangkat daerah di lingkungannya serta terhadap instansi lain (Pemerintah Kabupaten Kota, dan ANRI). Kemudian, telah dilaksanakan seluruh proses bisnis kearsipan meliputi penciptaan, penggunaan dan pemberkasan, serta terdapat juga penerapan tanda tangan elektronik oleh BSSN. 4. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki sumber daya pendukung dalam pengelolaan arsip elektronik yakni audit aplikasi SRIKANDI, penyediaan data center, sertifikat diklat teknis digitasi arsip serta helpdesk aplikasi SRIKANDI. 5. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah bergabung pada simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), namun hanya melaksanakan sebagian tanggung jawabnya sebagai simpul jaringan. | tanggung jawab sebagai simpul dalam pemuatan informasi kearsipan untuk arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan serta evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional. |   |
| 11  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang | 2.5   | 2    | 1          | 1. Dokumen renaksi tidak sesuai pedoman 2. Waktu tindak lanjut masih lama   | Perlu Menyusun Renaksi dan Melaksanakan Sosialisasi  | Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi Digital |

| No. | Komponen   | Sub Komponen                                      | Indikator Penilaian                                   | Bobot | Skor  | Skor Index | Catatan   | Rekomendasi  | Tim Penilai  |
|-----|------------|---|---|-------|-------|------------|---|--|--|
|     |            |   | Sudah Diselesaikan                                    |       |       |            |   |  | Pelayanan Publik                                   |
| 12  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Kualitas Kebijakan                             | 2     |       |            |   |  | Lembaga Administrasi Negara                        |
| 13  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Hukum                                | 2     | 55.99 | 1.12       | Pelaksanaan Reformasi Hukum cukup.                  | Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu menjadi baik dan ditingkatkan.   | Kementerian Hukum dan HAM                          |
| 14  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 2     |       |            | Masuk lokus EPSS, tapi tidak submit penilaian EPSS. | -  | Badan Pusat Statistik                              |
| 15  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Tata Kelola Pengadaan                          | 2.5   | 85.32 | 1.28       | Baik  | Selamat atas prestasi yang diraih. Tingkatkan pencapaian khususnya untuk keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ.   | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 16  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Sistem Merit                                   | 4     | 173   | 1.69       |   | 1. Menyusun SKJ secara lengkap (manajerial, sosiokultural, teknis) untuk seluruh jabatan; 2. Melaksanakan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai; 3. Melaksanakan pemetaan talenta berdasarkan Permenpan 3/2020; 4. Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang (5 tahun); 5. Melaksanakan pengisian Administrator dan Pengawas dengan metode assessment; 6. Menyusun analisis permasalahan kinerja dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasinya. | Komisi Aparatur Sipil Negara                       |
| 17  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan                     | Indeks Pelayanan Publik                               | 1.5   | 3.7   | 1.11       |   |  | "Kementerian PANRB - Asisten Deputi                |

| No. | Komponen   | Sub Komponen                                      | Indikator Penilaian                        | Bobot | Skor  | Skor Index | Catatan   | Rekomendasi   | Tim Penilai  |
|-----|------------|---|--|-------|-------|------------|---|---|--|
|     |            |   | Reformasi Birokrasi                        |       |       |            |   |   | Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik |
| 18  | RB General | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | 1.5   | 87.05 | 1.31       |   |   | Ombudsman Republik Indonesia                             |
| 19  | RB General | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi     | Indeks SPBE                                | 9     | 3.12  | 5.62       | Rekomendasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id | "Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" |  |
| 20  | RB General | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi     | Capaian IKU Makro                          | 2     | 100   | 2          |   |   | Tim Penilai Nasional                                     |
| 21  | RB General | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi     | Capaian IKU Non Makro                      | 8     | 68    | 3.77       |   |   | Tim Penilai Nasional                                     |
| 22  | RB General | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi     | Opini BPK                                  | 5     | 5     | 5          |   |   | Badan Pemeriksa Keuangan                                 |
| 23  | RB General | Capaian Sasaran                                   | Tindak Lanjut Rekomendasi                  | 4     | 53.9  | 2.16       |   |   | Badan Pemeriksa  |

| No. | Komponen   | Sub Komponen                                  | Indikator Penilaian         | Bobot | Skor  | Skor Index | Catatan     | Rekomendasi   | Tim Penilai                         |
|-----|------------|---|-----------------------------|-------|-------|------------|-------------|---|-------------------------------------|
|     |            | Strategis Reformasi Birokrasi                 | BPK                         |       |       |            |             |   | Keuangan                            |
| 24  | RB General | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi | Indeks BerAkhlas            | 4     | 59.3  | 2.37       | Cukup Sehat |   | Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA |
| 25  | RB General | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi | Survei Penilaian Integritas | 10    | 69.24 | 6.92       | Rentan      | Rekomendasi 1 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.; Rekomendasi 2 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengeleolaan gratifikasi di instansi. (2) Menegakkan aturan terkait larangan dan sanksi penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten. (3) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi. (4) Membangun sistem pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.; Rekomendasi 3 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif, seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga | Komisi Pemberantasan Korupsi        |

| No. | Komponen | Sub Komponen | Indikator Penilaian | Bobot | Skor | Skor Index | Catatan | Rekomendasi  | Tim Penilai |
|-----|----------|--------------|---------------------|-------|------|------------|---------|--|-------------|
|     |          |              |                     |       |      |            |         | <p>penyalahgunaan honor kegiatan.; Rekomendasi 4 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Memastikan dan memperkuat vendor management system. (5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.; Rekomendasi 5 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.; Rekomendasi 6 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru dalam</p> |             |

| No. | Komponen   | Sub Komponen    | Indikator Penilaian        | Bobot | Skor | Skor Index | Catatan | Rekomendasi   | Tim Penilai  |                     |
|-----|------------|-----------------|----------------------------|-------|------|------------|---------|---|--|---------------------|
| 26  | RB General | Capaian Sasaran | Survei Kepuasan Masyarakat | 8     | 89.4 | 7.15       |         | <p>melaksanakan tugas. (3) Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat. (5) Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.;</p> <p>Rekomendasi 7 : Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.;</p> <p>Rekomendasi 8 : Optimalisasi/ peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.;</p> <p>Rekomendasi 9 : Perbaikan mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.</p> | Mendorong pelaksanaan SKM pada UPP yang belum melaksanakan | Kementerian PANRB - |

| No. | Komponen   | Sub Komponen                    | Indikator Penilaian   | Bobot | Skor | Skor Index | Catatan   | Rekomendasi   | Tim Penilai   |
|-----|------------|---------------------------------|---|-------|------|------------|---|---|---|
|     |            |                                 | Strategis<br>Reformasi<br>Birokrasi   |       |      |            |   |   | Asisten Deputi<br>Pemberdayaan<br>Partisipasi<br>Masyarakat |
| 27  | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan RB Tematik | Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)   | 0.4   | 0.22 | 0.22       | 1. Sasaran yg ditetapkan blm sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada; 2. Renaksi yg disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan (masih cenderung business as usual); 3. Kualitas renaksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, probis dan SOP, pengawasan, IT dan inovasi.                    | 1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Memastikan renaksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual; 3. Memastikan intervensi berupa renaksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, probis dan SOP, pengawasan, IT dan inovasi.       | Tim Penilai Nasional  |
| 28  | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan RB Tematik | Realisasi Investasi (Rencana Aksi)  | 0.4   | 0.13 | 0.13       | 1. Sasaran yg ditetapkan blm sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada; 2. Terdapat indikator yg belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 3. Renaksi yg disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan (masih cenderung business as usual); 4. Menyempurnakan renaksi yang memuat kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lainnya. | 1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 3. Memastikan renaksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual; 4. Menyempurnakan renaksi yang memuat kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lainnya. | Tim Penilai Nasional  |
| 29  | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan RB Tematik | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi) | 0.4   | 0.17 | 0.17       | 1. Terdapat indikator yg belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 2. Renaksi yang disusun belum berupa intervensi terhadap prioritas permasalahan utama.  | 1. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 2. Memastikan renaksi tematik berfokus pada prioritas permasalahan utama/kritis.   | Tim Penilai Nasional  |

| No. | Komponen   | Sub Komponen                    | Indikator Penilaian   | Bobot | Skor | Skor Index | Catatan   | Rekomendasi   | Tim Penilai          |
|-----|------------|---------------------------------|---|-------|------|------------|---|---|----------------------|
| 30  | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan RB Tematik | Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)                                     | 0.4   | 0.33 | 0.33       |   |   | Tim Penilai Nasional |
| 31  | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan RB Tematik | Laju Inflasi (Rencana Aksi)   | 0.4   | 0.17 | 0.17       | Renaksi belum memuat kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lainnya | Menyempurnakan renaksi yang memuat kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lainnya | Tim Penilai Nasional |
| 32  | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan RB Tematik | Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)   | 0.6   |      | 0          |   |   | Tim Penilai Nasional |
| 33  | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan RB Tematik | Realisasi Investasi (Capaian Output)  | 0.6   |      | 0          |   |   | Tim Penilai Nasional |
| 34  | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan RB Tematik | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output) | 0.6   |      | 0          |   |   | Tim Penilai Nasional |
| 35  | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan RB Tematik | Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)                                   | 0.6   |      | 0          |   |   | Tim Penilai Nasional |
| 36  | RB Tematik | Strategi Pelaksanaan RB Tematik | Laju Inflasi (Capaian Output)   | 0.6   |      | 0          |   |   | Tim Penilai Nasional |
| 37  | RB Tematik | Capaian Dampak RB Tematik       | Penurunan Tingkat Kemiskinan (Capaian Dampak)                                     | 3     | 2.23 | 2.23       |   |   | Tim Penilai Nasional |
| 38  | RB Tematik | Capaian Dampak RB Tematik       | Peningkatan Realisasi Investasi (Capaian Dampak)                                  | 3     | 0.75 | 0.75       |   |   | Tim Penilai Nasional |
| 39  | RB Tematik | Capaian Tingkat                 |   | 3     | 2.13 | 2.13       |   |   | Tim Penilai          |

| No. | Komponen   | Sub Komponen              | Indikator Penilaian   | Bobot | Skor | Skor Index | Catatan | Rekomendasi | Tim Penilai          |
|-----|------------|---------------------------|---|-------|------|------------|---------|-------------|----------------------|
|     |            | Dampak RB Tematik         | Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)                                   |       |      |            |         |             | Nasional             |
| 40  | RB Tematik | Capaian Dampak RB Tematik | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak) | 3     | 0.53 | 0.53       |         |             | Tim Penilai Nasional |
| 41  | RB General | Koefisien                 | Koefisien   | 10    |      |            |         |             | Tim Penilai Nasional |